



**PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**



**DINAS PEMBERDAYAAN
PERMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

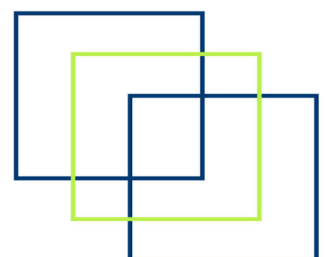
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026



Jl. Jend. Sudirman, Tungkal IV Desa, Kec. Tungkal
Iilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi
36514



<https://p3ap2kb.tanjabbarkab.go.id/>



KATA PENGANTAR


Puji Syukur dipanjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 telah selesai disusun sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu Rencana Kerja Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, maka disusunlah Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026 mendatang dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Kuala Tungkal, 09 Mei 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. H. MUHAMMAD YUNUS
Pembina Utama Muda
NIP. 19680417 198810 1 001

Daftar Isi

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | iii |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 1 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 | 3 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 |
| Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu | 6 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 | 6 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 13 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | 21 |
| 2.4 Review Terhadap RKPD | 22 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 23 |
| Bab III Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | 24 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 24 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah | 26 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 29 |
| Bab IV Rencana Kerja (RENJA) dan Pendanaan Perangkat Daerah | 38 |
| Bab V Penutup | 49 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, yang merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah yang defenitif, dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mendasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor: 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana dan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2026

1. Maksud :

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mendukung visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026.

2. Tujuan :

Tujuan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 untuk terselenggaranya tugas pokok dan fungsi serta tercapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan

3. Mensinkronkan serta mensinergikan program dan kegiatan Dinas dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian latar belakang, landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Awal Rencana Kerja (RENJA), maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 dan capaian Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026, Review terhadap RKPD, Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, menyampaikan usulan program dan kegiatan Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026.

BAB IV RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi evaluasi capaian target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis, menguraikan kegiatan-kegiatan yang targetnya belum tercapai dan pelayanan yang harus dilaksanakan pada Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) menyajikan pengukuran terhadap kinerja kegiatan dan target yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun sebelumnya. Dilakukannya evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) pada tahun sebelumnya, selain akan didapat persentase pencapaian kinerja dari target yang ditentukan, juga hambatan atau permasalahan yang mungkin timbul yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan dan sejauh mana program dan kegiatan tersebut merupakan prioritas pencapaian kebutuhan yang diinginkan dalam masyarakat. Dengan adanya evaluasi tersebut maka program dan kegiatan yang akan direncanakan pada tahun berikutnya diharapkan menjadi lebih baik.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 melaksanakan 10 (Sepuluh) program 29 kegiatan dan 79 sub kegiatan, dengan sumber dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun dana yang dikelola untuk program pembangunan atau Belanja Operasi (Barang dan Jasa) Tahun 2025 yang bersumber dari APBD dan Dana DAK BOKB Fisik dan Non Fisik sebesar Rp. **19.813.130.985,-** realisasi anggaran sampai dengan triwulan I Tahun 2025 (keadaan bulan Maret) Tahun 2025 sebesar Rp. **1.548.802.318,-** atau **7,82%**.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) program dan kegiatan yang bersumber dari APBD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat disajikan dalam **Tabel TC.29** berikut:

FORMULIR E. 81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN IV TAHUN 2024

| No | Sasaran | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi 2024 | | REALISASI KINERJA PADA 2024 | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2024) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Akhir Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%) | | Unit Kerja PD Penanggung jawab | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--------------------|---|------|--|-------------|-----------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|--------------|--|--------------------|--|--------|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | | K | Satuan | Rp | K | Rp | K | Rp | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | | TRIWULAN III | | TRIWULAN IV | | Target | | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 + 12 | 14 = 13/5 x 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor | 100% | % | 38.849.066.650 | 100% | 1.166.022.071 | 100% | 7.829.910.465 | 25% | 1.265.315.072 | 25% | 514.015.605 | 25% | 3.170.859.970 | 25% | 2.554.539.562 | 100% | 7.504.730.209 | 200% | 8.670.752.280 | 200,00 | 22,32 | Sekretariat Dinas P3AP2KB | | | | | | | | | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Laporan Keuangan Tahunan OPD | 7 | Laporan | 25.441.248.208 | 1 | Laporan | 192.580.000 | 1 | Laporan | 4.551.727.215 | - | 731.667.193 | - | 383.018.094 | - | 2.046.633.767 | 1 | Laporan | 1 | Laporan | 4.303.373.579 | 2 | 4.495.953.579 | 28,57 | 17,67 | Sekretariat DP3AP2KB | | | | | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan layanan administrasi umum | 100 | Persen | 2.703.577.567 | 100 | % | 414.087.046 | 100 | % | 433.382.650 | 25 | % | 88.692.724 | 25 | % | 68.836.000 | 25 | % | 137.685.330 | 25 | % | 136.696.545 | 200 | 845.997.645 | 200,00 | 31,29 | Sekretariat DP3AP2KB | | | | | |
| | | Administrasi barang milik daerah | Kartu inventaris barang milik daerah | 5 | Kartu inventaris | 88.500.000 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 100,00 | - | Sekretariat DP3AP2KB | | | | | | | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tingkat kehadiran pegawai | 100 | Persen | 399.850.000 | 100 | persen | 32.000.000 | 100 | persen | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Kartu | 0 | persen | 100 | 32.000.000 | 100,00 | 8,00 | Sekretariat DP3AP2KB | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 48 | unit | 1.365.317.350 | 48 | unit | 177.658.060 | 48 | unit | 1.616.991.200 | 12 | Unit | 72.994.800 | 12 | Unit | 16.360.000 | 12 | Unit | 12 | Unit | 821.926.008 | 12 | Unit | 669.055.190 | 96 | 1.757.994.058 | 200,00 | 128,76 | Sekretariat DP3AP2KB | | | |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan PD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | 74 | Dokumen | 711.286.525 | 14 | dokumen | 48.745.800 | 14 | Dokumen | 111.794.400 | 3 | Dokumen | 10.750.000 | 3 | Dokumen | 12.187.200 | 5 | Dokumen | 3 | Dokumen | 66.490.000 | 3 | Dokumen | 22.267.200 | 14 | Dokumen | 111.694.400 | 28 | 160.440.200 | 37,84 | 22,56 | Sekretariat DP3AP2KB |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah BMD penunjang urusan OPD | 182 | Unit | 6.146.702.000 | 33 | unit/item/set | 104.327.000 | 33 | unit | 879.135.000 | 10 | Unit | 310.000.000 | 0 | Unit | 5 | Unit | 5 | Unit | 25.242.000 | 18 | Unit | 516.475.000 | 33 | Unit | 851.717.000 | 66 | 956.044.000 | 36,26 | 15,55 | Sekretariat DP3AP2KB | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 | Persen | 1.992.585.000 | 100 | persen | 196.624.165 | 100 | Persen | 236.880.000 | 25 | Persen | 51.210.355 | 25 | Persen | 33.614.311 | 25 | Persen | 25 | Persen | 72.882.865 | 25 | Persen | 67.991.102 | 100 | Persen | 225.698.633 | 200 | 422.322.798 | 200,00 | 21,19 | Sekretariat DP3AP2KB |
| | Meningkatnya Implementasi Pengarus Utamaan Gender, peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase OPD dan Desa melaksanakan PPRG | 10% | % | 3.798.292.100 | 10% | 771.662.300 | 10% | 595.639.200 | 2,5% | 98.335.200 | 2,5% | 72.415.000 | 2,5% | 152.568.835 | 2,5% | 182.871.000 | 10% | 506.190.035 | 20% | 1.277.852.335 | 200,00 | 33,64 | Bid. Pemberdayaan Perempuan | | | | | | | | | |
| | | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kelembagaan PUG | 90 | Lembaga PUG | 664.960.608 | 15 | Lembaga PUG | 65.535.000 | 15 | Lembaga PUG | 37.920.000 | 3 | Lembaga PUG | 4.500.000 | 4 | Lembaga PUG | 20.365.000 | 4 | Lembaga PUG | 4 | Lembaga PUG | 6.000.000 | 4 | Lembaga PUG | 5.620.000 | 15 | Lembaga PUG | 36.485.000 | 30 | 102.020.000 | 33,33 | 15,34 | Bid. Pemberdayaan Perempuan |
| | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kab/Kota | Jumlah perempuan yang berperan/partisipasi dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 1400 | Orang | 2.877.897.642 | 200 | orang | 666.137.300 | 200 | orang | 529.469.200 | 50 | orang | 92.185.200 | 50 | orang | 50.950.000 | 50 | orang | 50 | orang | 129.278.835 | 50 | orang | 175.601.000 | 200 | orang | 448.015.035 | 400 | 1.114.152.335 | 28,57 | 38,71 | Bid. Pemberdayaan Perempuan |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan | 30 | Lembaga Layanan PP | 255.433.850 | 10 | Lembaga Layanan PP | 39.990.000 | 5 | Lembaga Layanan PP | 28.250.000 | 2 | Lembaga Layanan PP | 1.650.000 | 1 | Lembaga Layanan PP | 1.100.000 | 1 | Lembaga Layanan PP | 1 | Lembaga Layanan PP | 17.290.000 | 1 | Lembaga Layanan PP | 1.650.000 | 5 | Lembaga Layanan PP | 21.690.000 | 15 | 61.680.000 | 50,00 | 24,15 | Bid. Pemberdayaan Perempuan |
| | | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase layanan penanganan pengaduan kekerasan | 100% | % | 1.127.429.750 | 100% | 107.558.000 | 100% | 468.231.200 | 25% | 6.300.000 | 25% | 78.610.000 | 25% | 57.702.251 | 25% | 211.746.200 | 100% | 354.358.451 | 200% | 461.916.451 | 200,00 | 40,97 | Bid. Pemberdayaan Perempuan | | | | | | | | | |
| | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah/ Kabupaten | Jumlah perempuan korban kekerasan | 1 | - | 27.429.750 | - | - | - | 2 | 115.500.000 | - | - | - | - | - | 1 | 7.400.000 | 1 | Kali | 1 | Kali | 97.280.000 | 2 | Kali | 104.680.000 | 2 | Kali | 104.680.000 | 200,00 | 381,63 | Bid. Pemberdayaan Perempuan | | |
| | | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah perempuan korban rujukan | 1 | Kasus | 350.000.000 | 5 | kasus | 107.558.000 | 5 | Kasus | 268.360.000 | 1 | Kasus | 6.300.000 | 2 | Kasus | 78.610.000 | 1 | Kasus | 1 | Kasus | 37.323.900 | 1 | Kasus | 49.885.000 | 5 | Kasus | 172.118.900 | 10 | 279.676.900 | 1000,00 | 79,91 | Bid. Pemberdayaan Perempuan |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota | Jumlah unit layanan pengaduan kekerasan | 129 | Unit layanan | 750.000.000 | 24 | layanan | - | 24 | unit layanan | 84.371.200 | 6 | unit layanan | - | 6 | unit layanan | 12.978.351 | 6 | unit layanan | 6 | unit layanan | 12.978.351 | 6 | unit layanan | 64.581.200 | 24 | unit layanan | 77.559.551 | 48 | 77.559.551 | 37,21 | 10,34 | Bid. Pemberdayaan Perempuan |

| No | Sasaran | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi 2024 | | REALISASI KINERJA PADA 2024 | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2024) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%) | | Unit Kerja PD Penanggung jawab | |
|--|---------|--|---|--|-------------------------------------|---|--------|--|--------|-----------------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------------|--|--------|--|--------|---|--|--------------------------------|--|
| | | | | K | Satuan | Rp | K | Rp | K | Rp | TRIWULAN I | | TRIWULAN II | | TRIWULAN III | | TRIWULAN IV | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | | Rp. |
| | | | | | | | | | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 6 + 12 | 14 = 13/5 x 100% | 15 | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga | 10% | % | 650.000.000 | 2% | 65.958.800 | 2% | 64.636.000 | 0,5% | - | 0,5% | - | 0,5% | 63.256.000 | 0,5% | - | 2% | 63.256.000 | 4% | 129.214.800 | 40,00 | 19,88 | Bid. Pemberdayaan Perempuan |
| | | Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak anak Tingkat Daerah Kab/Kota | Jumlah keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga melalui KG | 1000 | Keluarga | 200.000.000 | 200 | Keluarga | 200 | 64.636.000 | - | - | - | - | 200 | 63.256.000 | - | - | 200 | 63.256.000 | 400 | 63.256.000 | 40,00 | 31,63 | Bid. Pemberdayaan Perempuan |
| | | Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga | Jumlah pusat layanan keluarga | 25 | Pusat layanan keluarga | 450.000.000 | 5 | Pusat Layanan Keluarga | 5 | 65.958.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 65.958.800 | 20,00 | 14,66 | Bid. Pemberdayaan Perempuan | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase OPD memiliki data pilah berdasarkan jenis kelamin | 100% | % | 360.000.000 | 100% | - | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | - | 100,00 | - | - | | |
| | | Pengumpulan pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota | Profil gender kabupaten banjung jabung | 5 | profe gender | 360.000.000 | 1 | Profil Gender | 1 | Profil Gender | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 20,00 | - | - | Bid. Pemberdayaan Perempuan | |
| Meningkatnya Implementasi Kabupaten Layak Anak | | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Persentase Pemenuhan hak anak yang terpenuhi | 54% | % | 2.372.219.269 | 49% | 412.632.900 | 49% | 456.348.400 | 12,25% | 9.000.000 | 12,25% | 6.000.000 | 12,25% | 237.611.600 | 12,25% | 175.722.800 | 49% | 428.334.400 | 98% | 840.967.300 | 181,48 | 35,45 | PPHA |
| | | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang dibina | 75 | Lembaga PHA | 1.342.050.744 | 50 | Lembaga PHA | 65 | Lembaga PHA | 15 | 9.000.000 | 15 | 6.000.000 | 15 | 89.889.600 | 20 | 44.250.000 | 65 | 149.139.600 | 115 | 541.642.400 | 153,33 | 40,36 | Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan penguatan dan pengembangan | 100 | Sekolah | 1.030.168.525 | 20 | Sekolah | 20 | 291.458.800 | - | - | - | - | 10 | 147.722.000 | 10 | 131.472.800 | 20 | 279.194.800 | 40 | 299.324.900 | 40,00 | 29,06 | Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak |
| | | Program Perlindungan Khusus Anak | Persentase anak yang memperoleh layanan perlindungan khusus | 27,30% | % | 2.090.000.000 | 25,50% | 114.815.000 | 25,50% | 506.557.000 | 6,375% | - | 6,375% | 51.561.800 | 6,375% | 71.177.000 | 6,375% | 288.883.180 | 25,50% | 411.621.980 | 51,00% | 526.436.980 | 186,81 | 25,19 | Bidang Perlindungan dan |
| | | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak | 2 | upaya pencegahan | 730.000.000 | 8 | upaya pencegahan | 2 | 185.588.000 | - | - | 0,5 | 46.308.000 | 0,5 | 39.848.000 | 1 | 86.177.000 | 2 | 172.333.000 | 10 | 172.333.000 | 500,00 | 23,61 | Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak |
| | | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan | 30 | Orang | 340.000.000 | 35 | Orang | 30 | 215.869.000 | - | - | 10 | 5.253.800 | 10 | 3.979.000 | 10 | 130.620.180 | 30 | 139.852.980 | 65 | 139.852.980 | 216,67 | 41,13 | Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak |
| | | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | 109 | Unit layanan PA | 1.020.000.000 | 15 | Unit Layanan PA | 17 | 105.100.000 | - | - | - | - | 5 | 27.350.000 | 12 | 72.086.000 | 17 | 99.436.000 | 32 | 214.251.000 | 29,36 | 21,01 | Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak |
| Terkendalinya | | Program Pengendalian Penduduk | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | 1,9 | % | 1.602.992.000 | 1,91 | 305.539.901 | 1,91 | 284.144.000 | 1,91 | 12.000.000 | 1,91 | 8.000.000 | 1,91 | 90.370.000 | 1,91 | 172.595.000 | 1,91 | 282.965.000 | 1,9 | 588.504.901 | 1,90 | 36,71 | Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Grand Design Pengendalian Penduduk | 100% | % | - | 100% | - | 100% | - | 25% | - | 25% | - | 25% | - | 25% | - | 100% | - | 100% | 100 | - | - | | |
| | | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Kebijakan (Perda/ Perbup) yang mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas dalam rangka Pengendalian Penduduk | 19 | Kebijakan/ Perda/ Perbup/ SSK/ GDPK | 805.000.000 | 3 | Kebijakan/ Perda/ Perbup/ SSK/ GDPK | 3 | 39.934.000 | - | - | - | - | 3 | 109.921.000 | 3 | 109.921.000 | 6 | 149.855.000 | 31,58 | 18,62 | Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan | | |
| | | Pemetaan Perkiraan Jumlah penduduk yang Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah profil kependudukan yang update tingkat kabupaten | 19 | Profil KKBPK | 797.992.000 | 3 | Profil KKBPK | 3 | 265.605.901 | - | 12.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 90.370.000 | 1 | 62.674.000 | 3 | 173.044.000 | 6 | 438.649.901 | 31,58 | 54,97 | Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Adapun kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Adapun indikator kinerja pelayanan ada yang merupakan indikator kinerja utama dan ada yang ditentukan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK). Kinerja pelayanan yang dilaksanakan merupakan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja setiap tahunnya.

Di bawah ini disajikan tabel target kinerja dan pencapaian kinerja pelayanan Tahun 2024, sebagaimana tercakup pada **Tabel T.C. 30:**

TABEL T-C 30.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

| No | Indikator Kinerja | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|-----|---|----------------------|--------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| | | | | Tahun 2021 (thn n-2) | Tahun 2022 (thn n-1) | Tahun 2023 (thn n) | Tahun 2024 (thn n+1) | Tahun 2021 (thn n-2) | Tahun 2022 (thn n-1) | Tahun 2023 (thn n) | Tahun 2024 (thn n+1) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 08 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indek Pembangunan Gender (IPG) | | | 87,00 | 87,50 | 88,50 | 89 | 85,68 | 85,79 | 88,50 | 89 | Realisasi Capaian Tahun 2022 s/d triw. III |
| 2 | Indek Pemberdayaan Gender (IDG) | | | 68,50 | 69 | 69,50 | 70,00 | 68,31 | 73,2 | 69,50 | 70,00 | |
| 3 | Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD | | 40% | 30% | 35% | 40% | 40% | 3% | | | | |
| 4 | Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO(per 100.000 penduduk perempuan) | | 9 | 15 | 12 | 9 | 6 | 11,72 | 2,42 | 9 | 6 | |
| 5 | Angka Perceraian | | | 1,5 | 1,25 | 1,0 | 0,75 | 1,3 | 1,26 | 1,0 | 0,75 | |
| 6 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | | 0,026% | 0,026% | 0,026% | 0,026% | 0,026% | 0,026% | | 0,026% | 0,026% | |
| 7 | Skor Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) | | | 599 | 645 | 699 | 745 | 599 | 599 | 699 | 745 | Sudah memperoleh Status KLA Pratama |
| 14 | Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | |
| 1 | Angka Total Kelahiran/ (Total Fertilty Rate/TFR) per WUS 15-49 tahun | | 2,45 | 2,55 | 2,50 | 2,45 | 2,40 | 2,59 | 2,37 | 2,45 | 2,40 | Realisasi Capaian Tahun 2022 s/d triw. III |
| 2 | Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) | | | 69 | 68 | 67 | 66 | 69 | 34,85 | 67 | 66 | |
| 3 | Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) | | | 58,2 | 58,20 | 62,44 | 64,56 | 66,34 | 58,2 | 62,44 | 64,56 | |
| 4 | Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan menikah usia 15-49 tahun | | 67,5 | 65,6 | 66,8 | 67,5 | 68,3 | 64,4 | 58,9 | 67,5 | 68,3 | |
| 5 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak terpenuhi/Unmeet-Need) | | 20,05 | 27,05 | 25,05 | 20,05 | 18,05 | 9,19 | 16 | 20,05 | 18,05 | |

Adapun capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana tersebut di atas sampai dengan kondisi Triwulan III Tahun 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- I. Dalam mencapai sasaran kinerja meningkatnya kesetaraan gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang merupakan indikator kinerja utama. IPG dan IDG adalah tolok ukur untuk mengetahui capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan atau menggambarkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan IDG adalah merupakan alat ukur untuk melihat sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Adapun capaian terhadap IPG dan IDG Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah penghitungan oleh BPS, dengan komponen IPG antara lain (1) Angka Harapan Hidup, (2) Angka Harapan Lama Sekolah, (3) Rata-rata Lama Sekolah dan (4) Pengeluaran Per-kapita. Dan Komponen IDG antara lain (1) Keterlibatan Perempuan di Parlemen, (2) Perempuan sebagai monev, profesional, administrasi dan teknis serta (3) sumbangan perempuan dalam pendapatan. Tahun 2024 IPG ditargetkan sebesar 87,50 dan target IDG sebesar 85,79 maka pencapaian realisasi pada kondisi triwulan III Tahun 2024 realisasi/capaian IPG adalah 85,79, dan IDG di posisi 73,20. Penghitungan data IPG dan IDG adalah dikeluarkan oleh Kementerian PPPA.

Capaian realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan program pada kondisi triwulan IV Tahun 2024 dalam pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- I. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu:
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kabupaten/Kota, sub kegiatan yaitu:
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan output kegiatan, jumlah peserta pelatihan PUG target 15 orang dari Lembaga PUG dan Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 59.450.870,- Dengan realisasi keuangan Rp. 35.095.870,- tingkat capaian keuangan 60,72 % dan fisik 60,72% yaitu pelatihan PUG.
 - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan yaitu:

Sosialisasi peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, dengan output kegiatan jumlah organisasi wanita yang dilaksanakan peningkatan kapasitas yaitu DWP Kabupaten dan GOW target 200 orang, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 443.979.371- Adapun realisasi anggaran s/d triwulan III sebesar Rp. 261.461.282,-tingkat capaian keuangan 43,34% dan fisik 43,34%.

- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan yaitu:
Advokasi Kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan target 5 (Lima) Lembaga, pagu anggaran sebesar Rp. 19.999.770,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp.16.549.770 ,- 82,75% dan fisik 82,75%.

- II. Sasaran Kinerja meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak capaian indikatornya yaitu Ratio Kekerasan terhadap perempuan dengan target tahun 2024 sebanyak 12 Kasus dan kondisi triwulan III tahun 2024 sebesar 2,42 % dari target capaian ini diperoleh dengan penghitungan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah penduduk perempuan x 100.000, atau $4/153.570 \times 100.000 = 2,42\%$ Artinya sampai dengan kondisi triwulan III jumlah korban kekerasan terhadap perempuan sebanyak 4 kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak.

Capaian realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan program pada kondisi triwulan III Tahun 2024 dalam pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Perlindungan Perempuan dengan kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota, sub kegiatan yaitu:
Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota, dengan target Tahun 2024 sebanyak 30 kasus dan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 jumlah kasus sebanyak 4 kasus atau tingkat capaian sebesar 2,42%. Pagu anggaran sebesar Rp. 19.999.770,- dan realisasi s/d triwulan III sebesar Rp. 16.549.770- tingkat capaian keuangan 82,75%. Fisik 82,75%

- III. Sasaran kinerja meningkatnya kualitas keluarga dengan indikator Angka Perceraian, target tahun 2024 sebesar 1,5 dan realisasi pada kondisi triwulan III tahun 2024 ini angka perceraian sebesar 1,26%. Angka ini diperoleh dengan

menghitung jumlah kasus perceraian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada sebanyak 432 kasus perceraian (Angka perceraian kasar) dari jumlah penduduk tahun 2024 adalah 321.472 dikali 1000 maka angka perceraian sebesar 1,26. Angka ini dapat dikatakan masih tinggi karena dilihat dari jumlah kasus perceraian masih tinggi. Faktor penyebab tingginya jumlah perceraian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat didominasi karena faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran serta salah satu pihak meninggalkan. Rentannya ketahanan keluarga sebagai dampak Sulitnya ekonomi, pengurangan penghasilan, pembelajaran serta daring yang menyebabkan kejemuan pada anak-anak serta para orang tua, terutama seorang ibu yang semula hanya bertugas sebagai terkait urusan rumah tangga mendadak harus berperan seorang guru dan kebersamaan dirumah yang terlalu lama juga dapat menimbulkan stress bagi semua anggota keluarga. Selain itu juga perkawinan usia muda menjadi penyebab terjadinya perceraian karena ketidak siapan pasangan dalam membina Rumah Tangga. Tugas dan fungsi dari bidang pemberdayaan perempuan yaitu pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak, karena keterbatasan anggaran maka tahun 2024 kegiatan dimaksud tidak ada dilaksanakan.

- IV. Sasaran kinerja meningkatnya Status Kabupaten Layak Anak dengan indikator Skor capaian Kabupaten Layak Anak, Tahun 2021 target Skor 599 dan realisasi pada kondisi triwulan III telah mencapai Skor 599, maka tingkat capaiannya 100% dan telah mencapai Kabupaten Layak Anak dengan kategori Pratama dengan skor 599. Tercapainya target ini karena Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mempunyai regulasi mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perda Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak kemudian adanya keterlibatan Forum Anak Daerah dalam mengikuti Musrenbang Tingkat Kabupaten, tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga, tersedianya lembaga pengasuhan alternatif, semua Puskesmas sudah menjadi pelayanan ramah anak, serta 91,36% anak telah memiliki akta kelahiran, lebih dari 50% lebih Desa/Kelurahan telah memiliki Forum Anak dan PATBM yaitu Perlindungan anak Berbasis Masyarakat, kemudian 11 sekolah sudah ramah anak (6 SD, 3 SLTP, 2 SMA), selain itu telah tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga/LK3 dan Pusat Kreatifitas Anak.

Capaian realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan program pada kondisi triwulan III Tahun 2024 dalam pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/kota, sub kegiatan yaitu:
 - ❖ Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, output sub kegiatan jumlah pengembangan Media KIE pemenuhan hak anak target kinerja 20 KIE, dengan pagu anggaran Rp. 22.050.744,- realisasi s/d triwulan III sebesar Rp. 19.850.744,- atau tingkat capaian keuangan 90,02% dan fisik 89,93%.
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan yaitu:
 - ❖ Penyediaan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 22.905.925,- Output sub kegiatan jumlah penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina target 10 sekolah. Adapun realisasi anggaran s/d triwulan III sebesar Rp. 4.500.000,-atau tingkat capaian keuangan 19,65% dan fisik 19,64%
 - ❖ Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 7.909.600,- realisasi triwulan III belum ada.
- V. Sasaran kinerja terkendalinya kuantitas dan kualitas penduduk serta pemanfaatan bonus demografi dapat dilihat dari indikator kinerja Angka Total Kelahiran/TFR (Total Fertility Rate) per WUS 15-49 Tahun dengan target Tahun 2024 sebesar 2,55% dan Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) tahun per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) dengan target tahun 2021 sebesar 69%. Untuk capaian/realisasi kondisi triwulan III Tahun 2021 belum dapat dihitung karena karena penghitungannya adalah berdasarkan hasil pendataan SIGA yang dilakukan pada akhir tahun pelaksanaan.
- VI. Sasaran kinerja meningkatnya ketahanan, kesejahteraan keluarga dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dengan indikator kinerja yaitu: Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dengan target tahun 2021 sebesar

58,2%, Angka Pemakaian Cobtrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun dengan target sebesar 65,6% dan Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak terpenuhi/ Unmeedneed) dengan target 27,05%. Untuk capaian/realisasi kondisi triwulan III tahun 2021 belum dapat dihitung karena karena penghitungannya adalah berdasarkan hasil pendataan SIGA yang dilakukan pada akhir tahun pelaksanaan serta menunggu penghitungan secara nasional.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas didukung dengan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Capaian realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan program pada kondisi triwulan III Tahun 2024 dalam pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk dengan kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, sub kegiatan yaitu:
 - ❖ Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jejaring SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal, pagu anggaran Rp.29.999.990,- realisasi Rp.23.999.900,- atau tingkat capaian keuangan 80,00 % dan fisik 80,00%.
2. Program Keluarga Berencana (KB), kegiatan yang dilaksanakan:
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, sub kegiatan yaitu:
 - ❖ Advokasi Program KKBPK Kepada Stake Holder an Mitra Kerja dengan pagu anggaran Rp. 4.374.926,- Adapun realisasi anggaran sampai triwulan III realisasi keuangan Rp. 4.374.926,- atau tingkat capaian 100% dan fisik 100%.
 - ❖ Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan Pagu Anggaran 24.999.750,-Adapun realisasi anggaran sampai triwulan III realisasi keuangan Rp. 24.600.000,- atau tingkat capaian 98,40% dan fisik 98,40 %.
 - ❖ Program KIE dan Program KKBPK memlalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang dengan Pagu Anggaran 83.185.124,- Adapun realisasi anggaran sampai triwulan III realisasi keuangan Rp. 10.450.000,- atau tingkat capaian 12,56% dan fisik 12,56 %.

- b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), sub kegiatan yaitu:
 - ❖ Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), out sub kegiatan jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan kebutuhan PLKB, Non PNS untuk penguatan kapasitas program KKBPK, target satu kali monev dan 35 PLKB Non PNS dengan pagu anggaran sebesar Rp. 262.827.670,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 189.000.000,- tingkat capaian keuangan 71,91% dan fisik 71,91%.
 - ❖ Peningkatan penyediaan informasi data mikro program KKBPK di setiap Desa/Kelurahan Kewenangan Kabupaten/Kota pagu anggaran Rp. 25.567.200,- realisasi Rp. 25.567.200,- atau tingkat capaian 100% dan fisik 100%.
 - c. Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB, dengan sub kegiatan:
 - ❖ Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB, pagu anggaran sebesar Rp. 13.446.741,- realisasi keuangan 13.446.741,-, dengan tingkat capaian fisik dan keuangan 100%
 - d. Kegiatan Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan yaitu:
 - ❖ Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya, output sub kegiatan jumlah akseptor KB yang mendapat pembinaan dan pelayanan KB target 600 akseptor KB, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.390.500,- realisasi sebesar Rp. 13.470.500,- tingkat capaian keuangan 53,71% dan fisik 53,71%.
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), kegiatan yang dilaksanakan adalah:
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sub kegiatan yaitu:

- ❖ Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS), output kegiatan jumlah kelompok kegiatan (Poktan) yang dibentuk/direvitalisasi serta Kader yang dibina target 30 Kader dengan pagu anggaran sebesar Rp. 28.749.749,- triwulan III realisasi sebesar Rp. 22.749.749,- atau tingkat capaian keuangan 79,13% dan fisik 79,13%.

Permasalahan dan Solusi :

A. Permasalahan:

Dalam pencapaian Indikator Kinerja sasaran yang didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan III Tahun 2024 permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan program dan kegiatan masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dan SDM secara kuantitas maupun kualitas.
2. Minimnya pagu anggaran program sehingga tidak efektif dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

B. Solusi :

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas maka solusi yang dilaksanakan antara lain :

- 1 Dengan sarana dan prasarana serta SDM yang ada tetap menjalankan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan seminim mungkin dan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 2 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan pada DPA Perangkat Daerah, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan dan Keluarga Berencana tidak terlepas dari pelayanan terhadap masyarakat maupun perangkat daerah. Bidang urusan yang dilaksanakan yaitu urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, dan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Isu-isu strategis dalam kaitannya dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui program yang dilaksanakan secara komprehensif, haruslah menjadi komitmen dari seluruh jajaran aparatur yang mengemban tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, bidang

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dan bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, karena isu strategis adalah merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, bersifat kelembagaan dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Secara garis besar isu-isu penting/strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan disektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sosial.
2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat
3. Angka perceraian yang meningkat setiap tahunnya.
4. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
5. Pernikahan usia anak masih relative tinggi
6. Angka Kelahiran Total (TFR) masih tinggi di atas angka Provinsi.
7. Kebutuhan ber-KB yang belum terlayani (unmetneed).
8. Prevalensi stunting relative masih tinggi.
9. Bonus Demografi, proporsi penduduk usia produktif 15-64 tahun meningkat
10. Masih adanya angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun (Age Sfesifik Fertility Rate/ASFR dan Kehamilan yang tidak diinginkan.
11. Perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga serta terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga dalam berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan anak hingga kebahagiaan keluarga.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2026

Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2026 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada tahun 2026 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2026 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisa kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Telaahan terhadap Rancangan Akhir RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD meliputi kegiatan prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini Dinas. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Rancangan Akhir Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 berpedoman pada renstra Tahun 2021-2026.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat didiskusikan dalam pembahasan Forum Perangkat Daerah Lintas Sektoral Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pembahasan yang dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rancangan Akhir Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang di Kecamatan. Pada Forum Perangkat Daerah ada usulan program atau kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari kelompok masyarakat dan Perangkat Daerah Kecamatan. Akan tetapi usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, tentang telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Provinsi, maka kebijakan nasional dan Provinsi dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- A. Terkait dengan pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian dan Provinsi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam hal :
1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
Sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
Capaian sasaran ini di ukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
Sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut :
 - a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dan ratio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
 3. Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan di bagi jumlah perempuan di atas 18 tahun
 - a. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: persentase Kabupaten/Kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh perempuan (100%) korban kekerasan.
 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergisitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya partisipasi dan sinergisitas lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan masyarakat serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga masyarakat

5. Meningkatnya perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak anak
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Tingkat Kabupaten/Kota Layak Anak

- b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar.

- B. Terkait dengan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal pelayanan yaitu:

Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun)
2. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
3. Meningkatnya indeks pembangunan keluarga

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama Persentase pemakaian kontrasepsi.

1. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non MKJP

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

- a. Menurunnya kebutuhan ber-Kb yang tidak terpenuhi (unmet need)
- b. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)
- c. Meningkatnya dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama, Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi dan persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)

2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

- a. Menurunnya Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 12-19 tahun)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator Kinerja utama yaitu Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 (ASFR 15-19 tahun)

3. Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang keluarga Berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektifitas du Kependudukan dan KB

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

- a. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama, Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat merujuk pada program dan kegiatan yang ditetapkan pada Rencana Strategis tahun 2021-2026, dengan target kinerja untuk Tahun 2026. Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah **"Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, status Kabupaten Layak Anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi"**.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan jangka menengah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesetaraan gender
2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak
3. Meningkatnya kualitas keluarga
4. Meningkatnya Status Kabupaten Layak Anak (KLA)
5. Terkendalinya kuantitas dan kualitas penduduk serta pemanfaatan bonus demografi

6. Meningkatnya ketahanan, kesejahteraan keluarga dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB/KR)

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Perangkat daerah disajikan pada **Tabel 3.1** berikut:

Tabel 3.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | PENJELASAN/FORM PENGHITUNGAN | KONDISI AWAL 2025 | TARGET TAHUN 2026 | SATUAN | KET |
|--|--|--|---|-------------------|-------------------|--------|----------------------------------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berilmu dan Berahklak | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ <p>Dimana nilai penimbang didapatkan dari :</p> $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}}$ | 83,81 | 84,81 | Angka | Non IKU |
| | Meningkatnya Kesetaraan Gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Indeks Pembangunan Gender | IPM Perempuan dibagi IPM Laki-laki dikali 100% | 86,90 | 87,00 | Indeks | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar |
| | | Indeks Ketimpangan Gender | <p>Menghitung Indeks Antardimensi (Geometrik): Menghitung nilai indeks masing-masing dimensi untuk perempuan (<i>F</i>) dan laki-laki (<i>M</i>) menggunakan rumus rata-rata geometrik:</p> $G(F, M) = \sqrt{F \times M}$ <p>Menghitung Agregasi Harmonik: Menghitung rata-rata harmonik dari indeks antardimensi yang telah dihitung sebelumnya.</p> <p>Menghitung Indeks Dimensi Akhir: Menggabungkan hasil agregasi harmonik dari ketiga dimensi (kesehatan reproduksi, pemberdayaan, pasar tenaga kerja) untuk mendapatkan nilai IKG final.</p> | 0,54 | 0,53 | Indeks | |
| | | Indeks Pemberdayaan Gender | Indeks keterwakilan diparlemen ditambah Indeks pengambil keputusan ditambah Indeks distribusi pendapatan dibagi 3 (tiga) dikali 100% | 73,50 | 74,00 | Indeks | |
| | Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan | Rasio kekerasan terhadap perempuan | Jumlah Perempuan korban kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100.000 | 33,00 | 32,00 | % | |
| Meningkatnya Kualitas Keluarga | Angka Perceraian | Jumlah Perceraian dibagi jumlah penduduk dikali 1000 | 2,10 | 2,00 | Angka | | |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | PENJELASAN/FORM PENGHITUNGAN | KONDISI AWAL 2025 | TARGET TAHUN 2026 | SATUAN | KET |
|--------|---|---|---|-------------------|-------------------|--------|------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | Meningkatnya Perlindungan terhadap Anak | Indeks Perlindungan Anak | <p>Normalisasi Data (Metode Min-Maks) Semua indikator harus disamakan arah dan satuannya. <i>Indikator Positif (Semakin tinggi semakin baik):</i></p> $SX_i = \frac{X_i - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \times 100$ <p><i>Indikator Negatif (Semakin tinggi semakin buruk):</i></p> $SX_i = 100 - \left(\frac{X_i - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \times 100 \right)$ <p>Dimana: SXi (nilai normalisasi), Xi (nilai data), Xmin (nilai minimal), Xmax (nilai maksimal). Pembobotan Klaster: Setelah semua indikator normal (skor 0-100), dihitung indeks untuk masing-masing klaster (misal: Hak Sipil, Kesehatan, Pendidikan). Setiap klaster memiliki bobot tertentu (Wj). Agregasi Akhir (IPA) Total Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah jumlah dari hasil perkalian bobot klaster (Wj) dengan indeks klaster (IndeksDj): $\text{Indeks} = \sum (W_j \times \text{Indeks } D_j)$</p> | 63,47 | 63,97 | Indeks | |
| | Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk | Angka Kelahiran Total/TFR (anak per wanita 15-49 tahun) | <p>TFR dihitung dengan menjumlahkan Angka Kelahiran Spesifik Umur (ASFR) kelompok 5 tahunan (15-19, 20-24, ..., 45-49), dikalikan 5 (lebar interval usia), lalu dibagi 1.000</p> $TFR = 5 \times \sum_{i=1}^n ASFR_i$ | 2,33 | 2,31 | Angka | |
| | | Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15 - 19 tahun | <p>ASFR_i : Angka Kelahiran Menurut Umur pada kelompok umur ke-i. Bi : Jumlah kelahiran dari wanita pada kelompok umur ke-i selama satu tahun. Pi : Jumlah penduduk wanita pada kelompok umur ke-i pada pertengahan tahun. 1.000 : Konstanta standar.</p> $ASFR_i = \frac{B_i}{P_i} \times 1.000$ | 28,00 | 27,00 | % | |

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | PENJELASAN/Form PENGHITUNGAN | KONDISI AWAL 2025 | TARGET TAHUN 2026 | SATUAN | KET |
|--------|---|--|---|-------------------|-------------------|--------|------|
| (01) | (02) | (03) | (04) | (05) | (06) | (07) | (08) |
| | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) | Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi Perempuan menikah usia 15-49 tahun | <p>Pembilang : Total peserta KB yang menggunakan metode modern (IUD, Implan, MOW, MOP, Suntik, Pil, Kondom).</p> <p>Penyebut : Total seluruh Pasangan Usia Subur (istri berusia 15-49 tahun) di wilayah dan periode yang sama</p> $mCPR = \frac{\text{Jumlah Peserta KB Modern Aktif}}{\text{Total Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100\%$ | 65,32 | 66,12 | % | |
| | | Cakupan PUS yang tidak terpenuhi (Unmet-Need) | <p>Komponen Rumus:</p> <p>Pembilang : Jumlah PUS (istri 15-49 tahun) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi, tetapi ingin menunda kehamilan atau tidak ingin anak lagi.</p> <p>Penyebut : Total seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) di wilayah tersebut, di mana istri berumur 15-49 tahun atau <15/>50 tahun tapi masih haid</p> $\left(\frac{\text{Jumlah PUS tidak ber-KB tapi ingin ber-KB}}{\text{Total Jumlah PUS}} \times 100\% \right).$ | 11,65 | 11,35 | Angka | |
| | Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS) | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | $iBangga = \frac{\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}}{3}$ | 62,70 | 62,80 | Indeks | |

3.3. Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dan diperlukan pembiayaan pada tahun 2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, direncanakan terdiri dari 10 program 28 kegiatan dan 69 sub kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp.11.551.550,- Adapun rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026 serta Prakiraan maju Tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seperti yang tersaji pada tabel TC.33 berikut ini:

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

Berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Lokasi |
|-------------------|---|--|---|---------------|--------------------|---------------|----------------|
| | | | Tahun- 6 (2026) | | Tahun (2027) | | |
| | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | Nilai AKIP Perangkat Daerah | 73,00 | | 73,00 | | Kec. Tkl Ilir |
| | | Rata-rata IndeK Kepuasan Masyarakat (IKM) | 88,50 | | 88,50 | | |
| | | Tingkat tindak lanjut temuan hasil Pemeriksaan | 100% | | 100% | | |
| 2 08 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor | 100% | 7.206.902.893 | 100% | 7.206.902.893 | Kec. Tkl Ilir |
| 2 08 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianaya Dokumen Perencanaan PD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Dokumen 14 | 176.600.000 | Dokumen 14 | 176.600.000 | Kec. Tkl Ilir |
| 2 08 01 2.01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6 Dokumen | 65.500.000 | 6 Dokumen | 65.500.000 | Kec. Tkl Ilir |
| 2 08 01 2.01 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 14 Laporan | 43.000.000 | 14 Laporan | 43.000.000 | Kec. Tkl Ilir |
| 2 08 1 1.01 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 68.100.000 | 4 Laporan | 68.100.000 | Kec. Tkl Ilir |
| 2 08 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Laporan Keuangan Tahunan OPD | 1 Laporan | 4.316.656.368 | 1 Laporan | 4.316.656.368 | Kec. Tkl Ilir |
| 2 08 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang/Bulan | 4.038.296.368 | 31 Orang/Bulan | 4.038.296.368 | Kec. Tkl Ilir |
| 2 08 01 2.02 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 15 Dokumen | 242.360.000 | 15 Dokumen | 242.360.000 | Kec. Tkl Ilir |
| 2 08 01 2.02 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 5 Laporan | 36.000.000 | 5 Laporan | 36.000.000 | Kec. Tkl Ilir |
| 2 08 01 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kartu Inventaris Barang Milik Daerah | 5 Kartu Inventaris | 19.500.000 | 5 Kartu Inventaris | 19.500.000 | Kec. Tkl Ilir |
| 2 08 01 2.03 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6 Laporan | 19.500.000 | 6 Laporan | 19.500.000 | Kec. Tkl Ilir |
| 2 08 01 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tingkat Kehadiran Pegawai | 100 Persen | 67.500.000 | 100 Persen | 67.500.000 | Kec. Tkl Ilir |
| 2 08 01 2.05 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 77 Paket | 42.500.000 | 77 Paket | 42.500.000 | Kec. Tkl Ilir |
| 2 08 01 2.05 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 3 Dokumen | 25.000.000 | 3 Dokumen | 25.000.000 | Kec. Tkl Ilir |
| 2 08 01 2.05 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 5 Orang | - | 5 Orang | - | Kec. Tkl Ilir |
| 2 08 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan layanan administrasi umum | 100 % | 598.296.525 | 100 % | 598.296.525 | Kec. Tkl Ilir |
| 2 08 01 2.06 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 14.000.000 | 12 Paket | 14.000.000 | Kec. Tkl. Ilir |
| 2 08 01 2.06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 94.924.000 | 12 Paket | 94.924.000 | Kec. Tkl. Ilir |
| 2 08 01 2.06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 284 Paket | 27.200.000 | 284 Paket | 27.200.000 | Kec. Tkl. Ilir |
| 2 08 01 2.06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 166 Paket | 60.952.525 | 166 Paket | 60.952.525 | Kec. Tkl. Ilir |
| 2 08 01 2.06 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 4.320.000 | 1 Dokumen | 4.320.000 | Kec. Tkl. Ilir |

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Lokasi |
|---------------------|---|--|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Tahun- 6 (2026) | | Tahun- 6 (2026) | | |
| | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2 08 01 2.06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2 Laporan | 396.900.000 | 2 Laporan | 396.900.000 | Kec.Tkl. Ilir |
| 2 08 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah BMD penunjang urusan OPD | 33 Unit | 1.299.872.000 | 33 Unit | 1.299.872.000 | Kec.Tkl. Ilir |
| 2 08 01 2.07 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 9 Unit | 797.786.000 | 9 Unit | 797.786.000 | Kec.Tkl. Ilir |
| 2 08 01 2.07 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | 159.536.000 | 4 Unit | 159.536.000 | Kec.Tkl. Ilir |
| 2 08 01 2.07 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 20 Unit | 157.550.000 | 20 Unit | 157.550.000 | Kec.Tkl. Ilir |
| 2 08 01 2.07 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | 85.000.000 | 8 Unit | 85.000.000 | Kec.Tkl. Ilir |
| 2 08 01 2.07 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 | - | 0 | - | Kec.Tkl. Ilir |
| 2 08 01 2.07 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 100.000.000 | 10 Unit | 100.000.000 | Kec.Tkl. Ilir |
| 2 08 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 Persen | 404.830.000 | 100 Persen | 404.830.000 | Kec.Tkl. Ilir |
| 2 08 01 2.08 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 3.250.000 | 1 Laporan | 3.250.000 | Kec.Tkl. Ilir |
| 2 08 01 2.08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 62.100.000 | 1 Laporan | 62.100.000 | Kec.Tkl. Ilir |
| 2 08 01 2.08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 339.480.000 | 1 Laporan | 339.480.000 | Kec.Tkl. Ilir |
| 2 08 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 48 unit | 323.648.000 | 48 unit | 323.648.000 | Kec.Tkl. Ilir |
| 2 08 01 2.09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 14 Unit | 58.654.000 | 14 Unit | 58.654.000 | Kec.Tkl. Ilir |
| 2 08 01 2.09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 16 Unit | 89.994.000 | 16 Unit | 89.994.000 | Kec.Tkl. Ilir |
| 2 08 01 2.09 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 17 Unit | 75.000.000 | 17 Unit | 75.000.000 | |
| 2 08 01 2.09 0009 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 Unit | 100.000.000 | 1 Unit | 100.000.000 | |
| 2 08 02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase OPD dan Desa melaksanakan PPRG | 10% | 659.649.607 | 10% | 659.649.607 | |
| 2 08 02 201 | <i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota</i> | <i>Jumlah Kelembagaan PUG</i> | 15 Lembaga PUG | 130.000.000 | 15 Lembaga PUG | 130.000.000 | |
| 2 08 02 201 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota | 15 Dokumen | 20.000.000 | 15 Dokumen | 20.000.000 | |
| 2 08 02 201 0006 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/ Kota | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG | 15 Orang | 40.000.000 | 15 Orang | 40.000.000 | |
| 2 08 02 201 0008 | Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/ Kota | Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/ Kota | 30 Orang | 70.000.000 | 30 Orang | 70.000.000 | |
| 2 08 02 202 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah perempuan yang berperan/partisipasi dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 200 orang | 479.649.607 | 200 orang | 479.649.607 | |

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Lokasi |
|------------------|---|---|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------|
| | | | Tahun- 6 (2026) | | Tahun- 6 (2026) | | |
| | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2 08 02 202 0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota | 4 Dokumen | 479.649.607 | 4 Dokumen | 479.649.607 | |
| 2 08 02 203 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan | 5 Lembaga Layanan PP | 50.000.000 | 5 Lembaga Layanan PP | 50.000.000 | |
| 2 08 02 203 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan | 5 Lembaga | 50.000.000 | 5 Lembaga | 50.000.000 | |
| 2 08 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase layanan penanganan pengaduan kekerasan | 100% | 570.000.000 | 100% | 570.000.000 | |
| 2 08 03 201 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan | 2 kali | 150.000.000 | 2 kali | 150.000.000 | |
| 2 08 03 201 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota | 2 Dokumen | 150.000.000 | 2 Dokumen | 150.000.000 | |
| 2 08 03 202 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah perempuan korban kekerasan | 1 Kasus | 270.000.000 | 1 Kasus | 270.000.000 | |
| 2 08 03 202 0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | 30 Orang | 70.000.000 | 30 Orang | 70.000.000 | |
| 2 08 03 202 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota | 8 Layanan | 200.000.000 | 8 Layanan | 200.000.000 | |
| 2 08 03 203 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah unit layanan pengaduan kekerasan | 24 unit layanan | 150.000.000 | 24 unit layanan | 150.000.000 | |
| 2 08 03 203 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 30 orang | 100.000.000 | 30 orang | 100.000.000 | |
| 2 08 03 203 0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota | 5 Dokumen | 50.000.000 | 5 Dokumen | 50.000.000 | |
| 2 08 04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga | 2% | 130.000.000 | 2% | 130.000.000 | |
| 2 08 04 201 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga melalui KG | 200 Keluarga | 40.000.000 | 200 Keluarga | 40.000.000 | |
| 2 08 04 201 0002 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia | 4 Dokumen | 40.000.000 | 4 Dokumen | 40.000.000 | |
| 2 08 04 202 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah pusat pelayanan keluarga | 5 Pusat Layanan Keluarga | 90.000.000 | 5 Pusat Layanan Keluarga | 90.000.000 | |
| 2 08 04 202 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan | 5 Lembaga | 20.000.000 | 5 Lembaga | 20.000.000 | |
| 2 08 04 202 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota | 30 orang | 70.000.000 | 30 orang | 70.000.000 | |
| 2 08 05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase OPD memiliki data pilah berdasarkan jenis kelamin | 100% | 20.000.000 | 100% | 20.000.000 | |
| 2 8 5 201 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Profile Gender Kabupaten Tanjung Jabung | 1 Profile Gender | 20.000.000 | 1 Profile Gender | 20.000.000 | |
| 2 8 5 201 0002 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota | 44 Dokumen | 20.000.000 | 44 Dokumen | 20.000.000 | |

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Lokasi |
|------------------|--|--|---|--------------------|--|--------------------|----------------------|
| | | | Tahun- 6 (2026) | | Tahun- 6 (2026) | | |
| | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 2 08 06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase Pemenuhan hak anak yang terpenuhi | 54% | 460.000.000 | 54% | 460.000.000 | Tanjung Jabung Barat |
| 2 08 06 201 | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha yang dibina | 75 Lembaga PHA | 260.000.000 | 75 Lembaga PHA | 260.000.000 | Desa/kelurahan |
| 2 08 06 201 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia | 45 Organisasi | 130.000.000 | 45 Organisasi | 130.000.000 | Desa/kelurahan |
| 2 08 06 201 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota | 5 Dokumen | 130.000.000 | 5 Dokumen | 130.000.000 | Kab/pro/pusat |
| 2 08 06 202 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan penguatan dan pengembangan | 20 Sekolah | 200.000.000 | 20 Sekolah | 200.000.000 | Kecamatan |
| 2 08 06 202 0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota | 6000 Orang | 50.000.000 | 6000 Orang | 50.000.000 | Kecamatan |
| 2 08 06 202 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota | 20 Dokumen | 50.000.000 | 20 Dokumen | 50.000.000 | |
| 2 08 06 202 0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota | 1 Dokumen | 50.000.000 | 1 Dokumen | 50.000.000 | Tanjung Jabung Barat |
| 2 08 06 202 0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota | 3 Dokumen | 50.000.000 | 3 Dokumen | 50.000.000 | Tanjung Jabung Barat |
| 2 08 07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase anak yang memperoleh layanan perlindungan khusus | 27,30% | 360.000.000 | 27,30% | 360.000.000 | Tanjung Jabung Barat |
| 2 08 07 201 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak | 2 upaya pencegahan | 130.000.000 | 2 upaya pencegahan | 130.000.000 | Tanjung Jabung Barat |
| 2 08 07 201 0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan pencegahan KTA | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan pencegahan KTA | 10 Orang | 70.000.000 | 10 Orang | 70.000.000 | Tanjung Jabung Barat |
| 2 08 07 201 0005 | Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota | Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota | 15 Dokumen | 60.000.000 | 15 Dokumen | 60.000.000 | Desa/kelurahan |
| 2 08 07 202 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan | 30 Orang | 60.000.000 | 30 Orang | 60.000.000 | Tanjung Jabung Barat |
| 2 08 07 202 0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan | 30 Orang | 40.000.000 | 30 Orang | 40.000.000 | Tanjung Jabung Barat |
| 2 08 07 202 0007 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan | 30 Orang | 20.000.000 | 30 Orang | 20.000.000 | Tanjung Jabung Barat |
| 2 8 7 203 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | 21 Unit layanan PA | 170.000.000 | 21 Unit layanan PA | 170.000.000 | Tanjung Jabung Barat |
| 2 8 7 203 0005 | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK | 2 Kegiatan | 120.000.000 | 2 Kegiatan | 120.000.000 | Tanjung Jabung Barat |
| 2 8 7 203 0006 | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK | 21 Orang | 50.000.000 | 21 Orang | 50.000.000 | Desa/kelurahan |
| 2 14 02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | 1,9 | 367.998.000 | 1,9 | 367.998.000 | Tanjab Barat |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Grand Design Pengendalian Penduduk | 100% | | 100% | | |
| 2 14 02 201 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Kebijakan (Perda/ Perbup) yang mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk | 3 Kebijakan/ Perda/ Perbup/ SSK/ GDPK | 165.000.000 | 3 Kebijakan/ Perda/ Perbup/ SSK/ GDPK | 165.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 02 201 0002 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | - | - | - | - | Tanjab Barat |

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Lokasi |
|------------------|--|---|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Tahun- 6 (2026) | | Tahun- 6 (2026) | | |
| | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| (4) | (5) | (6) | (17) | (18) | (17) | (18) | (22) |
| 2 14 02 201 0009 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | 23 Satuan Pendidikan | 165.000.000 | 23 Satuan Pendidikan | 165.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 02 202 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah profil kependudukan yang update tingkat kabupaten | 3 Profil KKBPK | 202.998.000 | 3 Profil KKBPK | 202.998.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 02 202 0002 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | 3 Dokumen | 75.998.000 | 3 Dokumen | 75.998.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 02 202 0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya | 13 Dokumen | 125.000.000 | 13 Dokumen | 125.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 02 202 0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | 1 Laporan | 1.000.000 | 1 Laporan | 1.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 02 202 0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | 13 Dokumen | 1.000.000 | 13 Dokumen | 1.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | Persentase tingkat ketidakterlaksanaan pemakaian alat kontrasepsi (Drop Out KB) | 19,58% | 1.186.000.000 | 19,58% | 1.186.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 03 201 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Frekuensi pelaksanaan advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB | 21 Kali | 188.000.000 | 21 Kali | 188.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 03 201 0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 1 Laporan | 1.000.000 | 1 Laporan | 1.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 03 201 0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 1 Laporan | 1.000.000 | 1 Laporan | 1.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 03 201 0012 | Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 1 Dokumen | 25.000.000 | 1 Dokumen | 25.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 03 201 0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan | 1 Dokumen | 1.000.000 | 1 Dokumen | 1.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 03 201 0014 | Advokasi Program Bangsa kencana oleh poka advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 21 Organisasi | 160.000.000 | 21 Organisasi | 160.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 3 202 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan dalam penyuluhan dan pergerakan program KKBPK | 100% | 744.000.000 | 100% | 744.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 3 202 0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | 268 orang | 200.000.000 | 268 orang | 200.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 3 202 0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/ PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana | 12 Laporan | 544.000.000 | 12 Laporan | 544.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 3 203 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP) | 100% | 153.000.000 | 100% | 153.000.000 | |
| 2 14 03 203 0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | 2218 Orang | 1.000.000 | 2218 Orang | 1.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 3 203 0005 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 1 Dokumen | 1.000.000 | 1 Dokumen | 1.000.000 | Tanjab Barat |

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | Lokasi |
|------------------|--|--|---|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Tahun- 6 (2026) | | Tahun- 6 (2026) | | |
| | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| (4) | (5) | (6) | (17) | (18) | (17) | (18) | (22) |
| 2 14 3 203 0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | 30 Unit | 1.000.000 | 30 Unit | 1.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 3 203 0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 12 Laporan | 75.000.000 | 12 Laporan | 75.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 3 203 0010 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | 620 Orang | 75.000.000 | 620 Orang | 75.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 03 204 | <i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i> | <i>Persentase omas/mitra kerja yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB</i> | 100% | 101.000.000 | 100% | 101.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 03 204 0001 | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 50 Organisasi | 50.000.000 | 50 Organisasi | 50.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 03 204 0002 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | 21 Dokumen | 50.000.000 | 21 Dokumen | 50.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 03 204 0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 21 Kampung | 1.000.000 | 21 Kampung | 1.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan anggota Poktan yang ber-KB (BKB, BKR, BKL, UPPKS) | 100% | 591.000.000 | 100% | 591.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 04 201 | <i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i> | <i>Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan) yang mendapatkan pembinaan KKS</i> | 100 Orang | 591.000.000 | 500 Orang | 591.000.000 | |
| 2 14 04 201 0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | 1 Laporan | 180.000.000 | 1 Laporan | 180.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 04 201 0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia | 20 Unit | 150.000.000 | 20 Unit | 150.000.000 | |
| 2 14 04 201 0019 | Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | 2 Orang | 60.000.000 | 300 Orang | 60.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 04 201 0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan | 672 Orang | 1.000.000 | 672 Orang | 1.000.000 | Tanjab Barat |
| 2 14 04 201 0026 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan | 1 Kelompok | 200.000.000 | 1 Kelompok | 200.000.000 | Tanjab Barat |
| | | | | 11.551.550.500 | | 11.551.550.500 | |

BAB IV

RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 adalah menggambarkan rencana program, sasaran dan kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 adalah merupakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan tersebut adalah untuk menguraikan target kinerja yang hendak dicapai tahun 2026. Kemudian penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 ini dibuat dengan telah disusunya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memantau perkembangan pelaksanaan program, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dari permasalahan serta sebagai laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang kemudian akan dijabarkan kepada program/kegiatan prioritas dalam hal pendanaannya. Pencapaian target kinerja program tidak hanya didukung dengan pendanaan dari APBD Kabupaten saja, namun pada tahun lalu juga didukung dengan sumber pendanaannya bersumber dari APBN/DAK yaitu untuk mendukung program dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jumlah program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat pagu indikatif anggaran APBD Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp. 11.550.551,-

Adapun Rencana Kerja (RENJA) dan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 tertuang pada tabel 4.1 berikut ini:

TABEL T-C. 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | SUMBER DANA |
|-------------------|---|--|---|-----------------|----------------------|-------------|
| | | | LOKASI | Tahun- 6 (2026) | | |
| | | | | Target | Rp. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | Nilai AKIP Perangkat Daerah | Kec. Tkl Ilir | 73,00 | | APBD |
| | | Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | 88,50 | | |
| | | Tingkat tindak lanjut temuan hasil Pemeriksaan | | 100% | | |
| 2 08 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor | Kec. Tkl Ilir | 100% | 7.206.902.893 | APBD |
| 2 08 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan PD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Kec. Tkl Ilir | 14 | 176.600.000 | APBD |
| 2 08 01 2.01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kec. Tkl Ilir | 6 Dokumen | 65.500.000 | APBD |
| 2 08 01 2.01 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kec. Tkl Ilir | 14 Laporan | 43.000.000 | APBD |
| 2 08 1 1.01 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kec. Tkl Ilir | 4 Laporan | 68.100.000 | APBD |
| 2 08 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Laporan Keuangan Tahunan OPD | Kec. Tkl Ilir | 1 | 4.316.656.368 | APBD |
| 2 08 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Kec. Tkl Ilir | 31 | 4.038.296.368 | APBD |
| 2 08 01 2.02 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kec. Tkl Ilir | 15 Dokumen | 242.360.000 | APBD |
| 2 08 01 2.02 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kec. Tkl Ilir | 5 Laporan | 36.000.000 | APBD |
| 2 08 01 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kartu Inventaris Barang Milik Daerah | Kec. Tkl Ilir | 5 | 19.500.000 | APBD |
| 2 08 01 2.03 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kec. Tkl Ilir | 6 Laporan | 19.500.000 | APBD |
| 2 08 01 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tingkat Kehadiran Pegawai | Kec. Tkl Ilir | 100 | 67.500.000 | APBD |
| 2 08 01 2.05 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kec. Tkl Ilir | 77 Paket | 42.500.000 | APBD |
| 2 08 01 2.05 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Kec. Tkl Ilir | 3 Dokumen | 25.000.000 | APBD |
| 2 08 01 2.05 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Kec. Tkl Ilir | 5 Orang | - | APBD |
| 2 08 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan layanan administrasi umum | Kec. Tkl Ilir | 100 | 598.296.525 | APBD |
| 2 08 01 2.06 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Kec. Tkl. Ilir | 12 Paket | 14.000.000 | APBD |
| 2 08 01 2.06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Kec. Tkl. Ilir | 12 Paket | 94.924.000 | APBD |
| 2 08 01 2.06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Kec. Tkl. Ilir | 284 Paket | 27.200.000 | APBD |
| 2 08 01 2.06 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Kec. Tkl. Ilir | 166 Paket | 60.952.525 | APBD |
| 2 08 01 2.06 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan | Kec. Tkl. Ilir | 1 Dokumen | 4.320.000 | APBD |

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | SUMBER DANA |
|---------------------|--|---|---|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | | LOKASI | Tahun- 6 (2026) | | |
| | | | | Target | Rp. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2 08 01 2.06 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kec.Tkl. Ilir | 2 Laporan | 396.900.000 | |
| 2 08 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah BMD penunjang urusan OPD | Kec.Tkl. Ilir | 33 Unit | 1.299.872.000 | |
| 2 08 01 2.07 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Kec.Tkl. Ilir | 9 Unit | 797.786.000 | |
| 2 08 01 2.07 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Kec.Tkl. Ilir | 4 Unit | 159.536.000 | |
| 2 08 01 2.07 0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Kec.Tkl. Ilir | 20 Unit | 157.550.000 | |
| 2 08 01 2.07 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Kec.Tkl. Ilir | 8 Unit | 85.000.000 | |
| 2 08 01 2.07 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kec.Tkl. Ilir | 0 | - | |
| 2 08 01 2.07 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Kec.Tkl. Ilir | 10 Unit | 100.000.000 | |
| 2 08 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Kec.Tkl. Ilir | 100 Persen | 404.830.000 | |
| 2 08 01 2.08 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kec.Tkl. Ilir | 1 Laporan | 3.250.000 | |
| 2 08 01 2.08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Kec.Tkl. Ilir | 1 Laporan | 62.100.000 | |
| 2 08 01 2.08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Kec.Tkl. Ilir | 1 Laporan | 339.480.000 | |
| 2 08 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Kec.Tkl. Ilir | 48 unit | 323.648.000 | |
| 2 08 01 2.09 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Kec.Tkl. Ilir | 14 Unit | 58.654.000 | |
| 2 08 01 2.09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Kec.Tkl. Ilir | 16 Unit | 89.994.000 | |
| 2 08 01 2.09 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | 17 Unit | 75.000.000 | |
| 2 08 01 2.09 0009 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | 1 Unit | 100.000.000 | |
| 2 08 02 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase OPD dan Desa melaksanakan PPRG | | 10% | 659.649.607 | |
| 2 08 02 201 | <i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah Kelembagaan PUG</i> | | 15 Lembaga PUG | 130.000.000 | |
| 2 08 02 201 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | | 15 Dokumen | 20.000.000 | |
| 2 08 02 201 0003 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | | 15 Orang | 40.000.000 | |
| 2 08 02 201 0004 | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | | 30 Orang | 70.000.000 | |
| 2 08 02 202 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah perempuan yang berperan/partisipasi dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | | 200 orang | 479.649.607 | |

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | SUMBER DANA |
|------------------|---|--|---|-----------------------------|--------------------|-------------|
| | | | LOKASI | Tahun- 6 (2026) | | |
| | | | | Target | Rp. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2 08 02 202 0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | 4 Dokumen | 479.649.607 | |
| 2 08 02 203 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan | | 5 Lembaga Layanan PP | 50.000.000 | |
| 2 08 02 203 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan | | 5 Lembaga | 50.000.000 | |
| 2 08 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase layanan penanganan pengaduan kekerasan | | 100% | 570.000.000 | |
| 2 08 03 201 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan | | 2 kali | 150.000.000 | |
| 2 08 03 201 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | 2 Dokumen | 150.000.000 | |
| 2 08 03 202 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah perempuan korban kekerasan | | 1 Kasus | 270.000.000 | |
| 2 08 03 202 0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan | | 30 Orang | 70.000.000 | |
| 2 08 03 202 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | 8 Layanan | 200.000.000 | |
| 2 08 03 203 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah unit layanan pengaduan kekerasan | | 24 unit layanan | 150.000.000 | |
| 2 08 03 203 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | | 30 orang | 100.000.000 | |
| 2 08 03 203 0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | 5 Dokumen | 50.000.000 | |
| 2 08 04 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase Keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga | | 2% | 130.000.000 | |
| 2 08 04 201 | <i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga melalui KG</i> | | 200 Keluarga | 40.000.000 | |
| 2 08 04 201 0002 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | | 4 Dokumen | 40.000.000 | |
| 2 08 04 202 | <i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i> | <i>Jumlah pusat pelayanan keluarga</i> | | 5 Pusat Layanan Keluarga | 90.000.000 | |
| 2 08 04 202 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan | | 5 Lembaga | 20.000.000 | |
| 2 08 04 202 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | 30 orang | 70.000.000 | |
| 2 08 05 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase OPD memiliki data pilah berdasarkan jenis kelamin | | 100% | 20.000.000 | |
| 2 8 5 201 | <i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> | <i>Profile Gender Kabupaten Tanjung Jabung</i> | | 1 Profile Gender | 20.000.000 | |
| 2 8 5 201 0002 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | | 44 Dokumen | 20.000.000 | |

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | SUMBER DANA |
|------------------|---|--|---|--|--------------------|-------------|
| | | | LOKASI | Tahun- 6 (2026) | | |
| | | | | Target | Rp. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2 08 06 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase Pemenuhan hak anak yang terpenuhi | Tanjung Jabung Barat | 54% | 460.000.000 | |
| 2 08 06 201 | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha yang dibina | Desa/kelurahan | 75 Lembaga PHA | 260.000.000 | |
| 2 08 06 201 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia | Desa/kelurahan | Organisasi 45 | 130.000.000 | |
| 2 08 06 201 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Kab/pro/pusat | Dokumen 5 | 130.000.000 | |
| 2 08 06 202 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anakyang dilakukan penguatan dan pengembangan | Kecamatan | Sekolah 20 | 200.000.000 | |
| 2 08 06 202 0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Kecamatan | Orang 6000 | 50.000.000 | |
| 2 08 06 202 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | Dokumen 20 | 50.000.000 | |
| 2 08 06 202 0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Tanjung Jabung Barat | Dokumen 1 | 50.000.000 | |
| 2 08 06 202 0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Tanjung Jabung Barat | Dokumen 3 | 50.000.000 | |
| 2 08 07 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase anak yang memperoleh layanan perlindungan khusus | Tanjung Jabung Barat | 27,30% | 360.000.000 | |
| 2 08 07 201 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak | Tanjung Jabung Barat | 2 upaya pencegahan | 130.000.000 | |
| 2 08 07 201 0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | Tanjung Jabung Barat | Orang 10 | 70.000.000 | |
| 2 08 07 201 0005 | Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota | Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota | Desa/kelurahan | Dokumen 15 | 60.000.000 | |
| 2 08 07 202 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan | Tanjung Jabung Barat | Orang 30 | 60.000.000 | |
| 2 08 07 202 0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan | Tanjung Jabung Barat | Orang 30 | 40.000.000 | |
| 2 08 07 202 0007 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan | Tanjung Jabung Barat | Orang 30 | 20.000.000 | |
| 2 8 7 203 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus | Tanjung Jabung Barat | 21 Unit layanan PA | 170.000.000 | |
| 2 8 7 203 0005 | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK | Tanjung Jabung Barat | Kegiatan 2 | 120.000.000 | |
| 2 8 7 203 0006 | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK | Desa/kelurahan | Orang 21 | 50.000.000 | |
| 2 14 02 | Program Pengendalian Penduduk | Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) | Tanjab Barat | 1,9 | 367.998.000 | |
| | | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Grand Design Pengendalian Penduduk | | 100% | | |
| 2 14 02 201 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Kebijakan (Perda/ Perbup) yang mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk | Tanjab Barat | 3 Kebijakan/ Perda/ Perbup/ SSK/ GDPK | 165.000.000 | |
| 2 14 02 201 0002 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Tanjab Barat | - | - | |

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | SUMBER DANA |
|------------------|--|--|---|-------------------------|----------------------|-------------|
| | | | LOKASI | Tahun- 6 (2026) | | |
| | | | | Target | Rp. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2 14 02 201 0009 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Tanjab Barat | 23 Satuan Pendidikan | 165.000.000 | |
| 2 14 02 202 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah profil kependudukan yang update tingkat kabupaten | Tanjab Barat | 3 Profil KKBP | 202.998.000 | |
| 2 14 02 202 0002 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | Tanjab Barat | 3 Dokumen | 75.998.000 | |
| 2 14 02 202 0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya | Tanjab Barat | 13 Dokumen | 125.000.000 | |
| 2 14 02 202 0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | Tanjab Barat | 1 Laporan | 1.000.000 | |
| 2 14 02 202 0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | Tanjab Barat | 13 Dokumen | 1.000.000 | |
| 2. 14 03 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Persentase tingkat ketidakterlaksanaan pemakaian alat kontrasepsi (Drop Out KB) | Tanjab Barat | 19,58% | 1.186.000.000 | |
| 2 14 03 201 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Frekuensi pelaksanaan advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB | Tanjab Barat | 21 Kali | 188.000.000 | |
| 2 14 03 201 0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Tanjab Barat | 1 Laporan | 1.000.000 | |
| 2 14 03 201 0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Tanjab Barat | 1 Laporan | 1.000.000 | |
| 2 14 03 201 0012 | Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Tanjab Barat | 1 Dokumen | 25.000.000 | |
| 2 14 03 201 0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan | Tanjab Barat | 1 Dokumen | 1.000.000 | |
| 2 14 03 201 0014 | Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Tanjab Barat | 21 Organisasi | 160.000.000 | |
| 2 14 3 202 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan dalam penyuluhan dan pergerakan program KKBP | Tanjab Barat | 100% | 744.000.000 | |
| 2 14 3 202 0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Tanjab Barat | 268 orang | 200.000.000 | |
| 2 14 3 202 0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana | Tanjab Barat | 12 Laporan | 544.000.000 | |
| 2 14 3 203 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP) | | 100% | 153.000.000 | |
| 2 14 03 203 0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Tanjab Barat | 2218 Orang | 1.000.000 | |
| 2 14 3 203 0005 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Tanjab Barat | 1 Dokumen | 1.000.000 | |

| Kode | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | SUMBER DANA |
|------------------|---|---|---|-----------------|-----------------------|-------------|
| | | | LOKASI | Tahun- 6 (2026) | | |
| | | | | Target | Rp. | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2 14 3 203 0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | Tanjab Barat | 30 Unit | 1.000.000 | |
| 2 14 3 203 0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Tanjab Barat | 12 Laporan | 75.000.000 | |
| 2 14 3 203 0010 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Tanjab Barat | 620 Orang | 75.000.000 | |
| 2 14 03 204 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Persentase ormas/mitra kerja yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB | Tanjab Barat | 100% | 101.000.000 | |
| 2 14 03 204 0001 | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Tanjab Barat | 50 Organisasi | 50.000.000 | |
| 2 14 03 204 0002 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | Tanjab Barat | 21 Dokumen | 50.000.000 | |
| 2 14 03 204 0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Tanjab Barat | 21 Kampung | 1.000.000 | |
| 2 14 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Cakupan anggota Poktan yang ber-KB (BKB, BKR, BKL, UPPKS) | Tanjab Barat | 100% | 591.000.000 | |
| 2 14 04 201 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan) yang mendapatkan pembinaan KKS | | 100 Orang | 591.000.000 | |
| 2 14 04 201 0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Tanjab Barat | 1 Laporan | 180.000.000 | |
| 2 14 04 201 0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia | | 20 Unit | 150.000.000 | |
| 2 14 04 201 0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Tanjab Barat | 2 Orang | 60.000.000 | |
| 2 14 04 201 0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan | Tanjab Barat | 672 Orang | 1.000.000 | |
| 2 14 04 201 0026 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan | Tanjab Barat | 1 Kelompok | 200.000.000 | |
| 2 14 04 201 0028 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk | Tanjab Barat | - | - | |
| | | | | | 11.551.550.500 | |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 ini, merupakan tahap awal proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan dengan sinkronisasi pada Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. RKPD disusun mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (RENJA) ini akan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana setelah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 ini diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang diharapkan.

Keberhasilan dari Rencana Kerja (RENJA) bukan hanya ditentukan dalam proses penyusunannya, akan tetapi banyak dipengaruhi implementasi penerapannya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang optimal.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 ini dapat dijadikan bahan acuan seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) ini dibuat dengan penuh harapan dapat dilaksanakan secara terencana dan terukur.

Kuala Tungkal, 09 Mei 2025
KEPALA DINAS

Drs. H. MUHAMMAD YUNUS
Pembina Utama Muda
NIP. 19680417 198810 1 001